

## **RADEN INU KERTOPATI BESERTA KONTRIBUSINYA DALAM MEMIMPIN KERESIDENAN JAMBI PADA PERIODE 1945-1949**

M. Amjad  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
amjad@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan sebuah studi kualitatif deskriptif berbasis lapangan. Tujuannya adalah untuk menguraikan dan memaparkan peran serta kepemimpinan Raden Inu Kertopati selama masa ia memimpin Keresidenan Jambi pada periode 1945-1949. Untuk memperoleh informasi yang valid, penelitian ini menerapkan metode sejarah yang mencakup tahapan heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verifikasi), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, disamping studi terhadap berbagai sumber tertulis seperti dokumen, buku-buku relevan, serta foto-foto dokumenter yang terkait dengan figur Raden Inu Kertopati. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa pada awal masa kepemimpinannya sebagai Residen Jambi, Rd. Inu Kertopati langsung menjalankan program kerja yang terangkum dalam tiga pasal kebijakan. Program ini terbukti sangat berpengaruh bagi pembangunan Provinsi Jambi kala itu. Di antara capaian nyatanya adalah keberhasilannya memperlancar perdagangan internasional Jambi dengan Singapura. Ia bahkan mampu menyewa pesawat Catalina untuk kepentingan daerah dalam kerangka Republik Indonesia. Kontribusinya lebih jauh lagi dengan menyumbangkan dana untuk mendukung perjuangan fisik Republik Indonesia di Pulau Jawa. Demikianlah berbagai dampak signifikan yang dihasilkan dari kepemimpinan Raden Inu Kertopati.

**Kata Kunci:** Peran, Kepemimpinan, Inu Kertopati

### **Pendahuluan**

Kota Jambi mulai menunjukkan ciri-ciri pemerintahan kolonial setelah tahun 1858, ditandai dengan pembangunan sebuah benteng militer Belanda di seberang sungai dari keraton. Untuk mengawasi kepatuhan masyarakat terhadap perjanjian, Belanda menempatkan seorang agen politik yang juga berperan sebagai komandan militer di kota tersebut. Status administratif Jambi kemudian ditingkatkan menjadi sebuah keresidenan mandiri pada tahun 1906, dengan Kota Jambi sebagai ibu kotanya. Keresidenan ini terbagi atas tujuh wilayah *Onderafdeeling* (Lindayanti, dkk, 2014). Secara lebih rinci, Kota Jambi merupakan bagian dari *Afdeeling* Jambi yang mencakup 16 distrik, dan seorang Residen memimpin dengan dibantu oleh enam orang *kontrolir*. Peningkatan status terakhir terjadi ketika Jambi ditetapkan sebagai provinsi pada tanggal 30 Desember 1958, bersamaan dengan Provinsi Sumatra Barat dan Riau. Sebelumnya, Jambi merupakan bagian dari Provinsi Sumatra Tengah, dan pada masa awal kemerdekaan termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatra yang sangat luas sebagai salah satu keresidenan di dalamnya (Lindayanti,

dkk, 2014).

Pada 3 September 1945, Komite Nasional Indonesia (KNI) mengadakan rapat umum di gedung bioskop Capitol (Duta)—saat itu bernama Nanpo. Dalam sidang pleno, diumumkan pengangkatan dr. Sagaf Yahya sebagai Residen Jambi, yang pelantikannya kemudian disampaikan dalam rapat umum di bioskop Ratu. Namun, dr. Sagaf Yahya kemudian mengundurkan diri untuk kembali mengabdikan diri sebagai dokter rumah sakit umum, mengingat pada masa itu jasa medis sangat dibutuhkan pasca-situasi perang. Berdasarkan kehendak rakyat, posisinya digantikan oleh Raden Inu Kertopati, putra Sultan Thaha Saifuddin. Pelantikan resminya sebagai Residen Jambi dilaksanakan pada 10 November 1945, tak lama setelah Komite Nasional Jambi terbentuk (Anonim, 2013)..

Sebagaimana telah diuraikan, Inu Kertopati adalah putra dari Sultan Jambi terakhir, Sultan Thaha Saifuddin. Pasca kemerdekaan, ia diangkat sebagai Residen Jambi menggantikan dr. Sagaf Yahya. Berdasarkan fakta historis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kepemimpinan Raden Inu Kertopati dalam memimpin Keresidenan Jambi pada periode 1945-1949. Signifikansi perannya serta nilai keteladanan yang dapat diambil dari fenomena kepemimpinannya menjadi landasan bagi peneliti untuk mengangkat tema ini menjadi sebuah karya ilmiah.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini mengimplementasikan metode sejarah melalui serangkaian tahapan sistematis guna memperoleh temuan yang akurat. Metode sejarah pada hakikatnya merupakan suatu proses pemeriksaan dan analisis kritis terhadap berbagai rekaman dan artefak peninggalan masa lalu (Kuntowijoyo, 2003). Sebelum merekonstruksi peristiwa dan menuangkannya dalam bentuk historiografi, tahap kritis terhadap sumber-sumber sejarah mutlak dilakukan. Secara operasional, metode ini diterapkan dalam empat tahap utama, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Abdurahman, 2011).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Biografi Raden Inu Kertopati**

Raden Inu Kertopati adalah putra sulung dari Sultan Thaha Saifuddin dan Nyimas Pipit, yang dilahirkan di Sungai Gambir Lubuk Landai pada tahun 1901 (Anonim, 2013). Saat ayahnya wafat, usia Raden Inu Kertopati baru menginjak 17 tahun. Ketika pertempuran berkecamuk di Tebo, ia berusaha melarikan diri namun akhirnya tertangkap oleh pasukan Belanda yang menghadangnya di Mupeh. Senjata yang dibawanya, sebuah bedil yang telah kehabisan peluru, turut disita. Raden Inu Kertopati kemudian dibawa ke Jambi dan selanjutnya diasingkan ke Kediri, di mana ia dititipkan dan disekolahkan. Sementara itu, proses pemakaman jenazah Sultan Thaha Saifuddin diurus oleh Hakim Agama Muaro Tebo yang bernama Akhmad (Nasrudin, 1989).

Di tengah masyarakat Jambi, Raden Inu Kertopati lebih dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersikap kebabakan, bukan sekadar dilihat sebagai putra kesultanan. Banyak

kalangan mengakui kesantunan dan kerendahan hatinya. Sebelum menduduki jabatan sebagai Residen, ia telah memiliki pengalaman kepemimpinan yang luas, hampir memimpin setiap wilayah setingkat *Onder Distrik* (kecamatan) pada masa itu. Sosoknya dikenal sangat terbuka; perkataannya jujur dan tulus tanpa ada yang disembunyikan. Ia pun penuh kasih sayang terhadap masyarakat dan sangat menghormati para alim ulama, seakan selalu membutuhkan nasihat mereka. Terhadap anak muda, ia bersikap santun, layaknya seorang saudara atau paman.

### **Peran Raden Inu Kertopati**

Raden Inu Kertopati dilantik tak lama setelah Komite Nasional Jambi berdiri, yaitu secara resmi pada bulan November 1945. Pada awal masa kepemimpinannya, langkah pertama yang beliau ambil adalah melaksanakan program kerja yang berisi tiga poin utama, (1) Menyusun dan menetapkan struktur pemerintahan daerah Jambi, meliputi pembagian wilayah kabupaten, kewedanaan, dan kecamatan. (2) Menunjuk seorang kepala perusahaan minyak Republik Indonesia untuk Jambi, yaitu Rd. Sudarsono, yang juga merupakan ketua persatuan buruh minyak. (3) Menetapkan pengurus Funds Kemerdekaan Indonesia (F.K.I.) untuk Jambi, yaitu Rd. Sutoyo dan M. Amin Aini. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 1946, dibentuk dan dilantik pula Dewan Pertahanan Daerah dengan susunan sebagai berikut, (1) Ketua: Residen Raden Inu Kertopati (2) Wakil Ketua: Letnan Kolonel T.M. Insyah (3) Anggota: Rd. Hamzah (4) Anggota: Rd. Sudarsono (5) Anggota: Rd. H. Sutopo.

Dalam upaya memperkuat kelembagaan, pada September 1946 Raden Inu Kertopati berinisiatif menyempurnakan Badan Pekerja DPR Keresidenan dengan menambah dua orang anggota baru, yakni Saudara Salim dari Tungkal dan Ibrahim dari Bangko. Badan Pekerja inilah yang kemudian ditugaskan untuk merampungkan penyusunan aparat negara di tingkat kecamatan dan kewedanaan, serta merumuskan sejumlah peraturan terkait perdagangan barter dengan luar negeri dan pemungutan Funds Kemerdekaan Indonesia (F.K.I.) untuk barang-barang yang masuk dan keluar. Melalui perdagangan yang komoditinya berupa bahan pokok dan bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan negara tetangga, Jambi berhasil memperoleh keuntungan yang digunakan untuk memperoleh senjata dari luar negeri, sekaligus menstabilkan pasokan kebutuhan bagi pemerintah pusat.

Menjelang awal tahun 1947, Letnan Kolonel Tengku Moh. Insyah dipindahkan ke Komando Kemendemen Sumatera. Posisi komando residen kemudian dipegang oleh Mayor M. Yunus dari Komando PT (Pasukan Teritorial), yang tak lama kemudian digantikan oleh Letnan Kolonel Abadin sebagai Komandan Resimen. Tidak berselang lama setelah Letkol Abadin menjabat, terjadi rotasi di kalangan perwira yang melibatkan pemindahan sebagian personel ke Palembang. Kondisi ini menimbulkan suatu keganjilan atau keraguan dalam pikiran Letkol Azaddin, yang berada dalam lingkungan komando di wilayah Resimen II Jambi.

Menanggapi situasi tersebut, Panglima Tri Komando Kemendemen sementara, Letnan Kolonel Jenderal R. Soeharjo Wardoyo, mengutus Kolonel Azaddin ke Palembang. Tugasnya

adalah melaporkan perkembangan yang terjadi di Resimen II Garuda Putih Jambi kepada Sub Komando Sumatera Selatan. Atas perintah tersebut, Mayor M. Yusuf, yang menjabat sebagai Komandan Pasukan Teritorial (PT) Sumatera Selatan, ditugaskan untuk menyelesaikan permasalahan itu. Setelah menilai situasi, Komando Sumatera Selatan membentuk formasi baru yang dinamakan Resimen XVI Garuda Putih Jambi.

Setelah penyusunan personel ini, dalam konteks Provinsi Sumatera Tengah, Gubernur Muda Sumatera Tengah melakukan kunjungan. Sebelum tiba di Jambi, beliau terlebih dahulu mengunjungi daerah Riau. Kedatangannya di Jambi disambut oleh Residen Jambi Raden Inu Kertopati, Kapolisian Keresidenan Jambi Zainal Abidin, serta sejumlah pejabat pemerintah lainnya. Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan dan petunjuk kepada aparat pemerintahan di daerah Jambi, mengingat status Jambi sebagai bagian dari Sub-Provinsi Sumatera Tengah. Pembagian menjadi tiga sub-provinsi ini merupakan hasil dari rapat Komite Nasional Indonesia (KNI) se-Sumatera yang diadakan di Bukit Tinggi pada tanggal 26 April 1946.

Pada 27 Juli 1947, Belanda memulai Agresi Militer pertamanya yang menasar berbagai kota besar di Indonesia. Namun, dalam operasi militer pertama ini, Jambi tidak menjadi sasaran serangan. Hal ini disebabkan oleh kesiapan persenjataan Jambi yang dinilai memadai untuk menghadapi ancaman pada masa itu. Kekuatan tersebut diperkuat dengan kepemilikan senjata Anti Air Craft (AAC) dan alutsista lain yang diperoleh melalui perdagangan barter dengan negara tetangga, khususnya Singapura, dengan menukarkan komoditas seperti getah dan bahan pangan. Pasca-agresi pertama tersebut, Jambi bahkan turut berkontribusi mendukung daerah tetangga dengan menyuplai senjata dan berbagai perbekalan lainnya dari sumber daya militernya. Di samping itu, Jambi juga memiliki sumber minyak yang tidak hanya menghasilkan bensin tetapi juga memproduksi bahan bakar khusus untuk pesawat udara.

Sementara itu, jalur perairan vital yang menghubungkan Jambi dengan dunia luar, seperti Kuala Briak, Kampung Laut, dan Kuala Tungkal, diawasi secara ketat oleh kapal-kapal perang Belanda. Akibatnya, tidak ada yang diizinkan melintasi wilayah tersebut. Pedagang yang berusaha melintas akan ditawan dan ditangkap, bahkan orang-orang yang mencurigakan turut menjadi sasaran penangkapan. Karena tidak diserang dalam Agresi Militer I, pihak Jambi justru memanfaatkan kondisi itu untuk memfokuskan upaya pada pengumpulan dana. Tujuannya adalah memperbanyak persediaan senjata dan perlengkapan lainnya guna mengantisipasi kemungkinan serangan Belanda yang kedua (Agresi Militer II). Strategi ini memungkinkan Jambi melakukan barter bahan pangan dan karet dengan para pedagang Tionghoa yang berhasil menerobos blokade laut Belanda. Sebagai imbalannya, para pedagang tersebut membawa peralatan yang sangat dibutuhkan daerah Jambi serta bahan makanan.

Pada masa Agresi Militer Belanda I, Jambi mendapat kunjungan dari Wakil Presiden Mohammad Hatta. Beliau tiba setelah sebelumnya mengunjungi daerah Lampung melalui perjalanan darat. Kehadiran Wakil Presiden Hatta memberikan banyak pemahaman penting,

karena beliau menyampaikan amanat pemerintahan, menjelaskan situasi nasional secara umum, serta bertujuan membangkitkan semangat perjuangan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kunjungannya ke Jambi pada 4 Agustus 1947, Wakil Presiden menyampaikan perkembangan situasi di daerah lain, seperti di Pulau Jawa dan sekitarnya. Dalam pertemuan dengan anggota Dewan Pertahanan Daerah Keresidenan Jambi, beliau menegaskan bahwa Belanda akan terus berupaya menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya mempersiapkan strategi perang gerilya untuk menghadapi kemungkinan serangan Belanda ke kota-kota. Pada hari kedua kunjungannya, Wakil Presiden Hatta mengunjungi wilayah sumber minyak di Tempino. Di sana, beliau menyoroti pentingnya menjaga keamanan sumber minyak mengingat peran vitalnya dalam mendukung perjuangan. Setelah itu, Wakil Presiden Hatta langsung melanjutkan perjalanan ke Sumatera Barat, didampingi oleh Mr. Moh. Yakin dari Jambi.

Memasuki tahun 1947, situasi politik yang semakin memanas dengan Belanda membuat Residen Raden Inu Kertopati yakin bahwa serangan ke daerah Jambi akan terjadi. Sebagai langkah antisipasi, beliau memberikan dana sebesar Rp. 300.000 kepada masing-masing wedana untuk persiapan menghadapi kemungkinan serangan tentara Belanda. Uang tersebut diserahkan dalam keadaan terbungkus rapi, dengan pesan khusus dari Residen Inu Kertopati bahwa bungkusan itu hanya boleh digunakan jika pemerintah kewedanaan terpaksa mengungsi ke pedalaman akibat serangan Belanda (Lindayanti, dkk, 2014).

Berdasarkan pertimbangan strategis tersebut, Bapak Syamsu Bahrin dinilai sangat perlu diangkat sebagai Wedana Sarolangun. Hal ini karena kewedanaan tersebut merupakan front terdepan yang berbatasan langsung dengan daerah pendudukan Belanda di bagian selatan Sumatra. Sebagai konsekuensinya, posisi Wakil Ketua Badan Pekerja DPR Keresidenan kemudian ditunjuk kepada A. Syarnubi sebagai penggantinya. Pada akhir tahun 1947, Wakil Presiden Muhammad Hatta tiba dari wilayah selatan. Beliau didampingi oleh Dr. M. Isya, Gubernur Muda Sumatera Selatan, dan disambut oleh Wedana Syamsu Bahrin di daerah perbatasan Singkut. Kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia ini disambut oleh Residen Raden Inu Kertopati, selaku kepala pemerintahan daerah Jambi dan juga ahli waris Kesultanan Jambi yang masih hidup. Dalam kesempatan itu, Raden Inu Kertopati secara simbolis menyerahkan wilayah bekas kerajaan Jambi kepada Republik Indonesia, yang kemudian diterima oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta (Londayanti, dkk, 2014).

Kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia di Kota Jambi disambut dengan upacara adat budaya yang sangat mengharukan warga setempat. Acara penyambutan berlangsung di Lapangan Rawasari, ditandai dengan penyajian keris sebagai simbol mahkota kerajaan Jambi di atas talam emas yang dilapisi kain songket. Keris tersebut dibawa oleh seorang putri yang didampingi dua putri keraton lainnya. Kunjungan Mohammad Hatta ini melambangkan penyerahan tanah serta kesetiaan rakyat Jambi kepada Pemerintah Republik Indonesia, sebagai wujud dukungan dalam mempertahankan kemerdekaan melawan penjajahan. Dalam upacara tersebut, Wakil Presiden menyampaikan apresiasi atas kegigihan

rakyat Jambi dan menegaskan pesan singkat bahwa Belanda akan terus berupaya menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu, beliau menekankan pentingnya mempersiapkan strategi perang gerilya guna menghadapi kemungkinan serangan Belanda ke kota-kota (Lindayanti, dkk, 2014).

Pasca-ditetapkannya proklamasi kemerdekaan, beragam organisasi perjuangan pun bermunculan dengan pesat di tengah masyarakat. Organisasi-organisasi ini didirikan di setiap kewedanaan sebagai bentuk penyemangat bagi rakyat biasa. Pada masa itu, banyak hal yang mendorong masyarakat untuk segera bergabung sebagai relawan. Tak jarang, muncul cara-cara yang unik untuk membangkitkan semangat, meski terkadang mengandung unsur kebohongan. Salah satu contohnya adalah penerangan yang menyebarkan narasi bahwa kekalahan Jepang disebabkan oleh senjata modern bernama bom "ATOM". Untuk menarik perhatian rakyat, dikatakan bahwa ATOM adalah singkatan dari "ALLAH TOLONG ORANG MUSLIM". Demikianlah kira-kira upaya yang dilakukan para pejuang untuk membangkitkan semangat rakyat dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia pada masa itu.

Residen Jambi menerima kunjungan dari Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, pada tanggal 24 Juni 1948. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Presiden mengunjungi wilayah Sumatera secara keseluruhan. Kedatangan beliau disambut langsung oleh Residen Jambi, Raden Inu Kertapati, yang juga mendapat kesempatan untuk membuka rapat akbar dalam rangkaian kunjungan tersebut. Dalam amanatnya, Presiden Soekarno menyerukan pentingnya menjaga persatuan nasional yang telah terbina dan menyadari makna kemerdekaan tanah air yang menuntut kesetiaan serta komitmen kuat terhadap negara dan cita-cita kebangsaan. Pada malam harinya, Presiden memberikan pembekalan politik kepada para pemimpin rakyat, pegawai pemerintah, dan berbagai golongan masyarakat yang ada di Jambi (Toer, dkk, 2003).

### **Pengungsian Pemerintah Kerasidenan Jambi Dan Berhentinya Raden Inu Kertapati Dalam Keresidenan Jambi**

Menanggapi situasi tersebut, setelah proses serah terima jabatan antara Residen Raden Inu Kertapati dan penerima mandatnya, Bupati M. Kamil, Raden Inu Kertapati memutuskan untuk kembali ke Kota Jambi. Sementara itu, Bupati M. Kamil bersama Nuskam, Firdaus Khatab, Abusama, A. Syarnubi, dan lainnya melakukan pengungsian melalui Sungai Kaos menggunakan perahu motor, lalu melanjutkan perjalanan darat hingga tiba di Desa Merlung, ibu kota Marga Tungkal Ulu, yang menjadi lokasi pengungsian pertama dari ibu kota Jambi (Nasrudin, 1989). Keputusan Raden Inu Kertapati untuk kembali didorong oleh kabaran tentang serangan brutal tentara Belanda di Kota Jambi yang menewaskan banyak warga, termasuk ibu-ibu dan anak-anak. Pemicu utama keberangkatannya adalah gugurnya salah satu putranya dalam serangan tersebut, yang juga mengakibatkan keadaan "bumi hangus" di kota itu (Anonim, 2014)

Mempertimbangkan hal tersebut, karakter Raden Inu Kertapati sebagai seorang



Republikan kembali tercermin, di mana ia berusaha mengumpulkan emas untuk mendukung perjuangan Republik Indonesia. Demikianlah komitmen Raden Inu Kertopati yang mengerahkan segala daya upaya untuk mempertahankan Kota Jambi dan Republik Indonesia. Pada masa itu, Raden Inu Kertopati dan rombongannya terpaksa bersikap biasa di hadapan Belanda karena mereka sedang memegang kendali pemerintahan di Jambi. Saat Belanda tiba, mereka menyebut Jambi sebagai wilayah yang tidak memiliki pemimpin yang sah. Dalam situasi seperti ini, hanya orang yang berhati nurani terbuka, ikhlas, berpikiran sehat, dan arif yang dapat memahami dinamika yang terjadi. Sebagaimana Soekarno, Hatta, dan tokoh seperti Cokroaminoto di Jawa Barat memahami kondisi serupa, terlebih Raden Inu Kertopati yang berhasil mempertahankan wilayahnya tetap sebagai bagian dari Republik Indonesia.

Pada 31 Maret 1949, pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan sementara yang menganggap Jambi sebagai negara federal, padahal status aslinya adalah bagian dari Republik Indonesia. Dr. Van Roijen memahami bahwa keputusan ini tidak didukung data yang lengkap mengenai kesiapan Jambi menjadi negara federal. Sejak penyerbuan Belanda ke Jambi pada 29 Desember 1948 hingga gencatan senjata berdasarkan perundingan, tidak ada permintaan dari rakyat agar Jambi dijadikan negara federal. Pernyataan yang justru muncul berasal dari Raden Inu Kertopati, Syamsu Bahrin, H. Ali Hamzah, serta tokoh Jambi lainnya, yang menegaskan bahwa Jambi tetap merupakan wilayah Republik Indonesia.

Mempertimbangkan usia Raden Inu Kertopati yang telah lanjut, beliau mengajukan permohonan pensiun sehingga dilakukan penunjukan residen sementara sebagai pengganti. Bupati Bachsan ditetapkan untuk menggantikan posisinya. Namun, dalam masa transisi tersebut, Raden Inu Kertopati dipanggil oleh Presiden Soekarno dan ditanya apakah beliau masih sanggup dan bersedia melanjutkan tugas sebagai Residen Jambi. Raden Inu Kertopati menjawab bahwa usianya telah uzur dan beliau telah menjalani pengobatan selama enam bulan di Bandung akibat penyakit asma yang dideritanya. Atas dasar kondisi kesehatan tersebut, beliau memohon untuk diberhentikan dari jabatannya. Beberapa bulan setelah itu, keluarlah surat keputusan resmi yang menetapkan Bapak Bachsan sebagai penggantinya, sekaligus menandai pemberhentian Raden Inu Kertopati dari jabatan Residen Keresidenan Jambi.

## Kesimpulan

Di mata masyarakat Jambi, Raden Inu Kertopati dikenal sebagai pribadi yang ramah dan bersikap kebabakan, lebih dari sekadar dilihat sebagai putra kesultanan. Banyak yang mengakui kesantunannya, terutama karena pengalaman kepemimpinannya yang luas sebelum menjabat sebagai Residen Jambi. Hampir setiap wilayah setingkat *Onder Distrik* (setara kecamatan) pernah dipimpinnya. Ia dikenal sangat terbuka, berkata apa adanya tanpa menyembunyikan isi hati, penuh kasih sayang kepada rakyat, dan hormat kepada para ulama seakan selalu membutuhkan nasihat mereka. Terhadap generasi muda, ia bersikap sopan layaknya saudara atau paman. Jika muncul masalah di suatu daerah, ia tidak menyelesaikannya sendiri, melainkan merujuk kepada pemangku adat (*nenek mamak*) agar diselesaikan sesuai tradisi. Pada awal masa kepemimpinannya sebagai Residen Jambi,

langkah pertama yang dilakukan adalah melaksanakan program kerja yang terdiri dari tiga pasal utama, di antaranya menyusun dan menetapkan struktur pemerintahan daerah Jambi, termasuk pembagian wilayah kabupaten, kewedanaan, dan kecamatan.

### Daftar Pustaka

- Arif Furchan, *Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005.
- Bambang Suwondo, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Jambi*, Jakarta: Depdikbud, 1979.
- Bob Hering. *Soekarno, Arsitek Bangsa*, Jakarta: Kompas 2012.
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Dewan Pimpinan Cabang Legium Vetran RI, *Penyusunan Pemerintah Sipil dan Kekuatan Bersenjata Tahun 1945-1949 Di Daerah Jambi*, Jambi : Depdiknas, 2009.
- Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, Jakarta: Logos, 1999.
- Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Lindayanti, H. Junaidi. T Noor, Ujang Hariadi, *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah*, Jambi: Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Kota Jambi, 2014.
- Lindayanti, dkk. *Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah*. Badan perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi, 2014.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Muhammad Arif, *Pengantar Kajian Sejarah*. Bandung: Yrama
- Nasruddin, A. Mukty, 1989. "Jambi dalam Sejarah Nusantara 692-1949 M," monograf
- Peter Burke, *Sejarah dan Teori Sosial*, Terj. Mestika Zed dan Zulfani, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Resink, G.J, *Bukan 350 Tahun Dijajah*, Jakarta: komunitas Bambu, 2012.
- Rookmaker, *Over Djambi (Tentang Jambi) dialihbahasakan dan disunting oleh: NY.s.Hertini adiwoyo dan Budi prihatna*, Kantor arsip daerah provinsi Jambi No 13, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1992.
- Suntoyo Usman, *Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.



